

PENGELOLAAN WEBSITE DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN SEBAGAI AKSES INFORMASI PUBLIK

Nurul Afrina Prastiwi¹, Syukur Kholil², Solihah Titin Sumanti³

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: nurulafrina21@gmail.com¹, syukur_kholilda@yahoo.co.id², solihah.sumanti@gmail.com³

Abstract

This study aims to find out how to manage the website of the Asahan Regency Communication and Information Office as access to public information and to find out the obstacles in managing the Asahan Regency Communication and Information Office website as a request for public information. This study uses descriptive qualitative research methods. The theory used in this research is organizational information theory and new media. Data collection techniques were carried out by interview, observation and documentation. The informants of this study were selected based on a purposive sampling technique based on the criteria of having a task that is closely related to the management of the website as a public relations medium. The location of this research was conducted at the Office of Communication and Information Technology, Asahan Regency. The results of this study indicate that the asahankab.go.id website is well managed in disseminating information to the public regarding the activities carried out by the Asahan Regency Government. Diskominfo Asahan manages the website by providing a simple or user-friendly one so that it can be easily accessed by the public. The presentation of news content, photos and videos has followed the standardization of government websites and has followed Permenkominfo No. 28 of 2006 and Law no. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure (KIP). The process of managing a website includes checking or searching for information, involving several members of the organization.

Keywords: Website Management, Public Information, Organizational Information Theory

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan sebagai akses informasi publik serta mengetahui hambatan dalam pengelolaan website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan sebagai akses informasi publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori informasi organisasi dan new media. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ini dipilih berdasarkan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria memiliki tugas yang berkaitan erat dengan pengelolaan website sebagai media kehumasan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa website asahankab.go.id dikelola dengan baik dalam menyebarluaskan informasi kepada publik terkait kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan. Diskominfo Asahan melakukan pengelolaan website dengan menyediakan tampilan yang sederhana atau userfriendly agar mudah diakses oleh publik. Penyajian konten berita, foto dan video sudah mengikuti standarisasi website pemerintahan serta sudah mengikuti Permenkominfo No. 28 Tahun 2006 dan UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Proses pengelolaan website meliputi pemeriksaan atau penyaringan informasi, dengan melibatkan beberapa anggota organisasi.

Kata Kunci: *Pengelolaan Website, Informasi Publik, Teori Informasi Organisasi*

PENDAHULUAN

Informasi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Menurut Davis (1995) informasi adalah data-data yang telah diproses menjadi sebuah hal yang memiliki arti

sehingga akan bermanfaat untuk individu yang menerimanya dalam mengambil keputusan saat ini maupun untuk masa mendatang. Melalui informasi seseorang akan mengetahui mengenai kejadian yang ada di sekitarnya. Selain itu, dengan mendapatkan informasi maka pengetahuan dan wawasan masyarakat akan bertambah. Peradaban baru teknologi informasi sudah memasuki era digitalisasi sehingga pola perubahan masyarakat dalam mendapatkan dan mengakses informasi terus kian berubah. Hal ini semakin terlihat dengan adanya perkembangan teknologi.

Selain individu, saat ini pemanfaatan media online juga telah banyak dimanfaatkan berbagai lembaga. Salah satunya lembaga pemerintahan yang telah mendorong terwujudnya e-government. E-government merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi dalam pelayanan bagi warganya. Penggunaan e-government diharapkan mampu membawa manfaat dalam memberdayakan masyarakat melalui peningkatan akses informasi, meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat dan memperbaiki pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Penerapan e-government saat ini dilakukan dengan memanfaatkan media baru. Penggunaan media baru tersebut dapat melalui aplikasi maupun website.

Website atau situs web adalah salah satu dari sekian banyak sarana yang ada di internet. Website merupakan salah satu jenis atau layanan yang disediakan oleh internet yang paling banyak digunakan disamping layanan lainnya (Pamungkas & Saifullah, 2019). Sebuah website harus memiliki konten atau diisi oleh informasi yang berkualitas baik dan juga menimbulkan kenyamanan bagi pengguna umum dalam penggunaannya agar menemukan informasi yang dibutuhkan (Santoso, Delima, & Wibowo, 2019).

Selain dimanfaatkan sebagai media daring website juga digunakan sebagai media pelayanan kepada masyarakat. Hal ini juga dikemukakan oleh Wiratmo, Irfan, & Kuwatono (2017) yang mengatakan bahwa selain memberikan pelayanan publik website yang telah dibangun juga dapat memberikan informasi terkait situasi yang menjadi kepentingan masyarakat yang kian meningkat. Melalui adanya Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan tumbuhnya rasa hak untuk mengetahui, publik bergantung kepada pemerintah sebagai pihak yang mendapatkan tangan kanan oleh rakyat dalam mengatur suatu negara dengan lebih terbuka perihal menyampaikan dan memberikan informasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan (Diskominfo) dibentuk sebagai pelaksanaan PERDA No. 7 Tahun 2016 yang juga merupakan wadah atau tempat berbagi informasi bagi suatu daerah untuk menginformasikan kepada khalayak publik. Yang dimana informasi itu berupa kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan Intansi ini juga suatu bentuk nyata pemerintah kabupaten Asahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang media cetak dan elektronik, bidang teknologi informatika serta bidang statistik dan persandian, sehingga Diskominfo Asahan mengelola website sebagai media informasi publik untuk menyalurkan berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah dan melaksanakan pelayanan publik.

Website yang dikelola oleh Diskominfo Asahan didesain dengan semenarik mungkin. Hal ini dilihat dari standarisasi konten webstie sehingga Diskominfo merancang tampilan yang menarik dan menyesuaikan kebutuhan yang ada untuk setiap website yang dimiliki. Salah satu website yang dikelola oleh Diskominfo Asahan yaitu asahankab.go.id yang selalu mengalami perubahan tampilan dan isi yang disampaikan. Tampilan website dibuat lebih menarik dari sebelumnya sesuai dengan era Egovernment saat ini dan isi berita-berita yang disampaikan pun dibuat sesuai dengan kebutuhan publik.

Fungsi Diskominfo Asahan sebagai pengelola website memperlihatkan unsur kreatif dalam merancang dan mendesain website dengan semenarik mungkin. Tampilan website portal <https://asahankab.go.id/> dibuat dengan perpaduan warna yang selaras dengan ikon Kabupaten Asahan membuat kesan yang semakin hidup di layar. Tak hanya tampilan melainkan isi berita yang disampaikan juga terurut sesuai dengan kegiatan yang terjadi. Website pemerintah daerah diharapkan mampu memenuhi standar kualitas yang tinggi, mudah di akses oleh publik serta dapat memberikan citra yang baik melalui kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini, maka diperlukannya pengelolaan yang baik agar website menjadi media penyalur informasi yang berkualitas bagi masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengelolaan website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan sebagai akses informasi publik? 2) Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam pengelolaan website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan sebagai informasi publik?

KAJIAN PUSTAKA

Website merupakan kumpulan halaman yang berisi banyak informasi yang berupa teks, gambar, suara animasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga dapat diakses oleh siapapun di seluruh penjuru dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet Website berfungsi sebagai sarana informasi yang akan memberikan informasi ke seluruh dunia. Fasilitas internet yang paling populer salah satunya ialah WWW (world wide web), yaitu sistem yang membuat informasi dapat diakses melalui pendekatan hiperteks (Suyanto, 2003).

Sebuah website bisa berupa hasil kerja yang terdapat dari perorangan atau individu, menunjukkan kepemilikan dari sebuah organisasi perusahaan dan biasanya website itu menunjukkan beberapa bahasan khusus, atau kepentingan tertentu. Hubungan antara satu website ke website lain disebut sebagai hyperlink, sedangkan teks yang dijadikan media penghubung yaitu hypertext.

Website berfungsi sebagai media menyediakan informasi yang bersifat global karena dapat diakses dari mana saja selama dapat terhubung ke jaringan internet sehingga kita bisa menjangkau lebih luas dibandingkan dengan menggunakan media konvensional, seperti majalah, koran dan lain sebagainya.

Website Pemerintah adalah media komunikasi yang berfungsi dalam penyampaian informasi yang mencakup persoalan ruang lingkup pemerintah kepada khalayak. Adanya website ini dapat memudahkan pemerintah agar tidak terbatas dalam menyebarkan informasi, sehingga khalayak mudah untuk mendapatkan informasi dengan cepat (Masyhur, 2014).

Website sebagai langkah awal dalam menerapkan pemerintah yang baik, dan menjadi sarana yang sangat diperlukan untuk menyajikan isi pesan atau informasi untuk masyarakat. Mengetahui cara kerja dari website merupakan salah satu upaya dalam kegiatan memonitoring sekaligus mencari kekurangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas cara kerja website. sehingga selain meningkatkan minat masyarakat website juga sebagai sarana berkomunikasi dengan pemerintah juga meningkatkan kenyamanan selama menggunakan website (Moeller, Cicaterri, Presser, & Wang, 2003)

Menurut Inpres No. 3 (2003) dikutip dalam jurnal Kinerja Website Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia menjelaskan bahwa pembangunan website oleh setiap Lembaga pemerintah merupakan langkah awal dalam pembangunan e-Government. Paling mutakhir adalah pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor: 17/per/m.Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh pemerintah, pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mengamatkan untuk menjadikan media online (website) sebagai salah satu sarana dalam kegiatan diseminasi tersebut. sehingga jelas bahwa posisi website bagi pemerintah daerah sebagai salah satu sarana strategis dalam menjalankan aktivitas pemerintahan.

Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menyebutkan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi publik, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 28 F, yaitu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak memperoleh, mencari, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat sebaik-baiknya. Dengan demikian, dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (Moenek, Suwanda, & Santoso, 2020).

Keterbukaan Informasi Publik merupakan hal yang penting dalam bernegara, bahwa informasi merupakan sebuah sarana agar rakyat mengetahui berbagai informasi yang luas untuk turut berpartisipasi dari segi praktis. Keterbukaan informasi publik belakangan ini

menjadi tuntutan global yang disuarakan berbagai pihak. Menurut Sardar (1989) informasi menjadi bagian unsur kekuasaan, tanpa adanya informasi masyarakat akan sulit mendapat kekuasaan. Informasi yang hadir ke masyarakat sudah melewati mekanisme control, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah. Akan tetapi, dewasa ini perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola kebijakan informasi dalam sebuah negara, termasuk Indonesia. Informasi bukan lagi sesuatu yang dapat disembunyikan atau dikuasai, melainkan dengan memanfaatkan teknologi yang ada masyarakat dapat dengan mudah mencari dan mendapat informasi melalui berbagai media (Nupikso, 2015).

Moenek, Suwanda, & Santoso (2020: 6-7) menyatakan bahwa Pengelolaan dan penyelenggaraan KIP secara baik dan benar dapat memberikan manfaat bagi badan publik juga kepada bangsa secara keseluruhan, antara lain: a.) Menginformasikan Opini Publik melalui Informasi yang Akurat. b.) Informasi Publik yang Akurat dapat Mencegah Rumor Negatif dan Tidak Benar Beredar. c.) Meminimalisasi Korupsi dan Penyalahgunaan Informasi Orang Dalam. d.) Memperbaiki kinerja Badan Publik secara Lebih Tepat. e.) Membangun Hubungan Baik dan Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Badan Publik. f.) Akutabilitas Demokratis.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan adalah metode untuk mengumpulkan data kualitatif yang dimana peneliti berangkat ke lapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung tentang fenomena dalam suatu keadaan alamiah (Sugiyono, 2021).

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau mengungkapkan suatu peristiwa dan fakta secara mendalam melalui data yang dikumpulkan dan memberikan gambaran secara sistematis serta akurat. Dalam hal ini jenis penelitian deskriptif data yang dikumpulkan ialah berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan dengan angka-angka. Selanjutnya data tersebut berasal dari naskah wawancara, foto, video, rekaman, dokumen pribadi, catatan serta dokumen resmi lainnya, yang kemudian dianalisis sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. (Moleong, 2021).

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan yang beralamat di Jalan Mahoni No. 3 Kecamatan Kisaran Barat Kelurahan Mekar Sari, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Informan dalam data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang dinilai dapat menguasai suatu persoalan yang akan diteliti, selanjutnya memiliki keahlian dan wawasan yang cukup luas. dalam penelitian ini penulis menentukan informan dengan menggunakan metode Purposive Sampling. Peneliti memilih pengelola website sebagai informan utama yang dianggap paling penting dan paling mengetahui keadaan tersebut karena bersangkutan langsung sebagai pengelola. Adapun Informan penelitian atau narasumber dalam penelitian ini, yaitu Siti Rakhmawati, S.STP, M.M selaku Kepala Bidang Teknologi Informatika, Dra. Rosa Maria Siregar selaku Staff

Bidang Komunikasi Media Cetak & Elektronik, Dede Rizky Nasifah, S.Kom selaku Staff Koordinator Pengelola Website, Febrina Aldriana, S.Kom selaku Staff Koordinator Pengelola Website, Fauzi Indra Fahriza, S.Kom selaku Staff Programmer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data peneliti melakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan dibentuk sebagai pelaksanaan dari PERDA No.7 Tahun 2016 yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016. Dinas dibentuk dengan beberapa Dinas lainnya, seperti Dinas Perumahan dan Pemukiman. Adapun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan ini adalah Tipe B yang berfungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Media cetak dan Elektronik, Bidang Teknologi Informatika serta Bidang Statistik dan Persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan (Diskominfo) merupakan sumber atau mediator untuk menyebarluaskan informasi kepada khalayak publik. Salah satu website yang dikelola ialah portal.asahankab.go.id yang merupakan wajah dari Kabupaten Asahan dalam media baru. Diskominfo Asahan berperan untuk membantu urusan pemerintah daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik serta berperan aktif sebagai penyedia layanan dan informasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika tergolong dalam organisasi yang berada dalam lingkup informasi. Menerima dan menggunakan informasi tersebut untuk didistribusikan kembali kepada publik. Hal ini membuat Diskominfo berperan penuh dan bertanggungjawab dalam suatu proses pengelolaan informasi. Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi pemerintah yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika, Diskominfo tentunya menggunakan teknologi komunikasi sebagai komponen utama dari tugas yang dimiliki.

Dinas Komunikasi dan Informatika Asahan mempunyai ruang lingkup yang berbasis komputasi yang memegang peranan penuh dalam menyebarluaskan informasi kepada publik. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem komputasi atau bidang informatika yang mengurus bagian pemrograman, software, serta jaringan yang berbasis komputer. Salah satu bagian Diskominfo sendiri yaitu mengelola aplikasi dan nama domain yang telah ditetapkan. Website merupakan salah satu produk layanan publik yang dikelola oleh Diskominfo, yang dimana dikenal sebagai salah satu jenis dari perkembangan new media dalam kajian bidang ilmu komunikasi yang berfungsi sebagai perantara antara komunikator dan komunikan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menggunakan website sebagai media akses informasi publik dan sebagai media kehumasannya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan menjadi koordinator yang mengoperasikan hampir seluruh website pemerintah di Kabupaten Asahan. Dengan demikian, peneliti menganalisis salah satu dari website yang dikelola Diskominfo,

yaitu website dengan alamat domain asahankab.go.id yang menjadi portal resmi dari seluruh perangkat daerah Kabupaten Asahan.

Website asahankab.go.id merupakan sebuah media yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat baik masyarakat dalam daerah maupun diluar daerah, Website dikelola dengan semenarik mungkin dengan mengikuti perkembangan yang ada sehingga dapat menarik perhatian publik untuk mengakses segala bentuk kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Asahan. Konten yang disajikan dimuat dalam bentuk tulisan dan juga berupa video kegiatan Pemkab Asahan.

Proses pengelolaan website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan disusun melalui standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Tahapan yang dilakukan meliputi peliputan informasi yang harus diunggah, proses pemeriksaan atau penyaringan informasi, persetujuan, proses convert data ke bentuk elektronik/digital yang dapat diunggah ke website, mengunggah data, pemeriksaan hasil unggahan, lalu publish data. Proses ini melibatkan admin website, tim IT yang terdiri dari kepala bidang IT, staff koordinator website serta staff programmer. Dalam proses pengelolaan harus didasari dengan aturan Bersama yang memandu pilihan rutinitas yang akan digunakan untuk mengurangi ketidakpastian yang tengah dihadapi.

Oleh karena ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan akan berhasil dalam menyebarkan informasi melalui website yang telah dikelola. Hal ini sesuai dengan teori informasi organisasi, pada teori tersebut suatu organisasi harus memiliki suatu prosedur untuk mengelola seluruh informasi yang ingin diterima atau dikirimkan untuk mencapai tujuannya. Tentu saja prosedur yang dilakukan akan menimbulkan keberhasilan. Keberhasilan yang diraih Diskominfo dalam mengelola website yaitu adalah website yang dikelola sudah ditampilkan dengan mengikuti standarisasi website yang mengikuti panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah yang berfungsi untuk menunjang pengembangan dan pelaksanaan e-government.

Penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan tidak hanya dilakukan melalui media website saja, melainkan dari media sosial seperti, Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube, Dalam menyebarkan informasi Diskominfo pernah mengalami hambatan saat mengelola website. Dari hasil wawancara yang didapat hambatan yang terjadi ialah fasilitas yang kurang memadai seperti web yang masih menggunakan gratiskan, jaringan yang masih kurang stabil sehingga hal tersebut membuat Diskominfo mengalami kesulitan dalam memaksimalkan pengelolaan website.

Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan website menjadi masalah yang dihadapi beberapa pemerintah daerah. Hal ini terjadi di sebagian OPD, sehingga Diskominfo sulit mengelola dan membina operator website pemerintah daerah. Namun dalam hal ini Diskominfo tidak ada kendala SDM karena pada bagian ini Diskominfo sendiri memiliki bagian dan tim pengelolaan teknologi informasi.

Media baru (new media) adalah bukti nyata dari perkembangan teknologi komunikasi yang bisa langsung kita rasakan. Media baru merupakan perkembangan dari teknologi media yang sudah ada sebelumnya. Sejalan dengan itu Dinas Komunikasi dan Informatika Asahan mengupayakan pengelolaan website dengan menyediakan fasilitas yang memadai seperti web yang digunakan sudah diperbaharui tidak menggunakan gratisan lagi. Selanjutnya juga pada tampilan, sudah menampilkan konten yang sederhana atau userfriendly (mudah digunakan publik), tipografi, serta kecepatan akses halaman website, dapat diakses dengan perangkat apapun baik itu PC, android atau sebagainya.

Keberhasilan Diskominfo dalam menjalankan tugasnya mengelola website sebagai informasi publik dilihat dari isi konten yang di muat dan viewers/pengunjung dari website tersebut, Arah masuk pengunjung atau viewers lebih banyak melalui facebook dibandingkan melalui website. Akan tetapi, Dinas Komunikasi dan Informatika ini terbantu dengan adanya media sosial. Setelah adanya media sosial pengunjung atau viewers meningkat dari sebelumnya. Dengan memanfaatkan media sosial sebagai penyebaran informasi maka pengelolaan website pun juga semakin meningkat dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti uraikan peneliti dapat menyimpulkan mengenai Pengelolaan Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan Sebagai Akses Informasi Publik sebagai berikut:

1. Pengelolaan website asahankab.go.id diatur melalui standar operasional prosedur (SOP) yang dalam hal ini melibatkan admin website, tim IT yang terdiri dari kepala bidang IT, staff koordinator website serta staff programmer. Tahapan yang dilakukan meliputi peliputan informasi yang harus diunggah, proses pemeriksaan atau penyaringan informasi, persetujuan, proses convert data ke bentuk elektronik/digital yang dapat diunggah ke website, mengunggah data, pemeriksaan hasil unggahan, lalu publish data. Dalam hal ini, kedudukan Humas di Dinas Komunikasi dan Informatika Asahan juga sebagai pencari dan pengolah data, lalu data tersebut disebarluaskan ke semua media, seperti media cetak dan juga elektronik. Terkhusus untuk media online data tersebut diolah terlebih dahulu lalu dimodifikasi semenarik mungkin oleh Bidang Teknologi dan Informatika untuk dimuat ke website. Tampilan website yang dikelola sudah memenuhi standarisasi website pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Asahan mengupayakan pengelolaan website dengan menyediakan tampilan yang sederhana atau userfriendly, tipografi, serta kecepatan akses halaman website, dapat diakses dengan perangkat apapun baik itu PC, android atau sebagainya. Dimana hal ini sesuai dengan teori new media yang menciptakan adanya digitalisasi dalam pemahaman makna sebuah media dan menyebabkan adanya integrasi sosial antara website dengan masyarakat.
2. Kendala yang dialami ketika pengelolaan website dilakukan yaitu pada saat memuat atau mengisi konten dalam website tersebut. Penghambat tersebut tidak lain yaitu fasilitas yang kurang memadai serta jaringan internet yang belum stabil sehingga hal tersebut

membuat Diskominfo mengalami kesulitan dalam mengelola website. lalu kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan website di sebagian OPD, sehingga Diskominfo sulit mengelola dan membina operator website pemerintah daerah. Namun dalam hal ini Diskominfo tidak ada kendala SDM karena pada bagian ini Diskominfo sendiri memiliki bagian dan tim pengelolaan teknologi informasi. Akan tetapi seiring dengan itu, upaya yang dilakukan Diskominfo ialah berusaha mengelola website dengan memfasilitasi website dengan tidak lagi menggunakan gratisan dan menggunakan fitur web application firewall, yang berfungsi untuk menangkal virus dari luar serta memaksimalkan isi konten yang dimuat di website dengan menampilkan isi seperti artikel-artikel agar dapat menarik perhatian publik dan berupaya untuk menyebarkan informasi melalui berbagai media salah satunya media sosial yang dikelola oleh Diskominfo seperti Facebook, Instagram dan juga Youtube.

DAFTAR PUSTAKA

- Davis, G. (1995). Sistem Informasi Manajemen. PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Pamungkas, R., & Saifullah. (2019). Evaluasi Kualitas Website Program Studi Sistem Informasi Universitas PGRI Madiun Menggunakan Webqual 4.0. INTENSIF: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi.
- Santoso, H. B., Delima, R., & Wibowo, A. (2019). Pelatihan Pengembangan Web Profil Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa. E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 10(1), 41-48.
- Wiratmo, L. B., Irfan, N., & Kuwatono. (2017). Website Pemerintah Daerah Sebagai Sarana Online Public Relations. Jurnal ASPIKOM, 3(2), 326-339.
- Suyanto, M. (2003). Multimedia; alat untuk meningkatkan keunggulan bersaing. Yogyakarta: Andi.
- Masyhur, F. (2014). Kinerja Website Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia. Jurnal Pekommas, 17(1), 10.
- Moeller, M., Cicaterri, C., Presser, A., & Wang, M. (2003). Measuring e-bussiness Web Usage, Performance, and Availability. IBM Corp.
- Moenek, R., Suwanda, D., & Santoso, Y. P. (2020). Sistem Informasi Pelayanan Publik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lavenia Fitri, S. ., & Ali Alam, I. . (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(10), 2057–2070. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i10.301>
- Nupikso, D. (2015). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Website Pemerintah Daerah. IPTEK-KOM, 17(2), 113-128.
- Nur Safitri, I. ., & Nilwan, A. . (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Akuntansi. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial,

Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(10), 1959–1966.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i10.290>

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Moleong, L. J. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.